

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan daerah memainkan peran vital dalam tata kelola yang efektif di daerah setempat, secara langsung memengaruhi inisiatif pembangunan dan kualitas layanan publik yang diberikan kepada warga. Untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan, sangat penting untuk mengelola sumber penghasilan seperti PAD (Penghasilan Asli Daerah) dan transfer dengan transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan yang tepat terhadap dana-dana ini memastikan bahwa sumber daya dipakai secara efisien dan efektif, mendorong stabilitas dan keberhasilan jangka panjang bagi pemerintah daerah sekaligus mempromosikan pembangunan yang adil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kamala et al., 2025). Pengelolaan keuangan regional yang efektif, yang mencakup tahapan dari perencanaan strategis hingga pelaporan komprehensif, sangat penting untuk menjaga kepatuhan hukum dan meningkatkan kualitas pengeluaran publik. Dengan menerapkan langkah-langkah tata kelola yang kuat di setiap tahapan, otoritas bisa memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan publik. Penguatan mekanisme pengawasan dan pengendalian keuangan mendukung inisiatif pembangunan berkelanjutan, memungkinkan daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, sistem keuangan yang dikelola dengan baik menjadi landasan pertumbuhan jangka panjang, stabilitas, dan penyampaian layanan yang efektif kepada masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, proses penganggaran, verifikasi, dan pembayaran yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD ialah komponen penting yang menentukan kelancaran pengelolaan keuangan.

DPRD sebagai institusi legislatif daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan, pembahasan anggaran, serta pengendalian terhadap realisasi penggunaan anggaran daerah. Dengan demikian, penyelenggaraan proses tersebut secara tepat dan sesuai prosedur menjadi aspek yang sangat penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Efektivitas fungsi tersebut sangat bergantung pada kinerja internal bagian keuangan, khususnya Divisi Anggaran, Divisi Verifikasi, dan Divisi Pembayaran yang bekerja secara terintegrasi. Ketepatan waktu, kelengkapan administrasi, dan kesesuaian dokumen pada divisi-divisi tersebut menjadi prasyarat bagi terciptanya proses anggaran yang tertib dan akuntabel. Berlandaskan hal tersebut, kualitas tata kelola keuangan di DPRD ialah hasil sinergi antara pelaksanaan fungsi legislasi dan pengelolaan administrasi internal yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD. Keduanya memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Hasil observasi awal yang dilakukan pada tanggal 28 Juli 2025 bersama Bendahara Pembayaran, Ibu April, memperlihatkan adanya beberapa faktor yang berpotensi menghambat efektivitas proses anggaran, verifikasi, dan pembayaran di lingkungan Sekretariat DPRD. Permasalahan yang ditemukan yakni berupa

ketidaklengkapan dokumen administrasi, gangguan teknis dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta keterlambatan penyerahan dokumen oleh unit terkait. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan koordinasi antarbagian dalam mendukung kelancaran proses administrasi keuangan. Selain itu, permasalahan berulang seperti data blocking, ketidakselarasan antara dokumen perencanaan anggaran dan realisasinya, serta tertundanya proses verifikasi karena dokumen belum lengkap turut menjadi tantangan yang bisa memengaruhi optimalisasi pelaksanaan anggaran daerah. Hambatan- hambatan tersebut tidak jarang menyebabkan tertundanya realisasi program daerah dan menimbulkan ketidakpastian dalam proses administrasi keuangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan pengelolaan anggaran di DPRD Buleleng tidak hanya bersifat teknis, tetapi terkait erat dengan tata kelola internal dan pelaksanaan prinsip *Good Governance* yang belum sepenuhnya berjalan secara efektif.

Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa kurang efektifnya koordinasi dalam tata kelola internal menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya kendala dalam pelaksanaan proses administrasi dan pengelolaan keuangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Kendati demikian, fenomena ini tidak bisa dipandang sebagai akar permasalahan struktural, mengingat pegawai DPRD berstatus ASN dan seluruh mekanisme penggajian sudah memiliki standar birokrasi yang relatif stabil. Walaupun keterlambatan tersebut tidak terjadi secara terus-menerus, kondisi tersebut tetap perlu dicermati sebagai salah satu indikasi adanya hambatan dalam pelaksanaan proses verifikasi dan alur administrasi pada internal Sekretariat DPRD. Dengan demikian, isu gaji bukan ialah masalah utama, melainkan gejala yang memperlihatkan adanya ketidakteraturan dalam tahapan penganggaran, verifikasi,

dan pembayaran. Gejala ini mengisyaratkan bahwa persoalan tata kelola tidak berdiri sendiri pada satu jenis transaksi, tetapi bisa terjadi pada berbagai kegiatan belanja DPRD yang lebih luas cakupannya. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tidak hanya berfokus pada keterlambatan pembayaran gaji, tetapi pada keseluruhan struktur, mekanisme, dan koordinasi antar bagian yang membentuk tata kelola keuangan DPRD. Paragraf ini menjadi penting untuk menegaskan bahwa fokus penelitian berada pada konteks *Good Governance* secara menyeluruh, bukan pada isu administratif tunggal.

Fenomena hambatan dalam proses pengelolaan keuangan daerah tidak hanya terjadi di lingkup lokal, tetapi juga menjadi isu nasional yang berulang.

Berbagai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berulang mengungkap adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti ketidakpatuhan terhadap prosedur yang berlaku, lemahnya sistem pengendalian internal, serta pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan keuangan di sejumlah pemerintah daerah di Indonesia (Simanjuntak, 2024). Meskipun bersifat umum, pola ini juga tampak pada dinamika pengelolaan keuangan di DPRD Buleleng, khususnya dalam aspek kelengkapan dokumen dan ketepatan alur administrasi. Temuan seperti keterlambatan verifikasi, ketidaksesuaian antara dokumen pendukung dan realisasi, serta lambannya tindak lanjut terhadap koreksi berulang memperlihatkan perlunya evaluasi tata kelola di tingkat operasional. Oleh karena itu, kondisi yang terjadi di tingkat nasional tersebut bisa menjadi gambaran yang relevan untuk memahami berbagai tantangan yang juga berpotensi muncul dalam pelaksanaan proses penganggaran dan pembayaran di lingkungan DPRD Kabupaten Buleleng.

Beragam hambatan administratif seperti keterlambatan dokumen, gaji yang terlambat, kesalahan input SIPD, maupun ketidaksesuaian berkas pada dasarnya tidak bisa dipahami hanya sebagai kekeliruan teknis. Pola hambatan yang berulang memperlihatkan bahwa akar persoalan terletak pada tata kelola internal yang belum terkelola dengan baik. Ketidakteraturan alur proses, ketidakjelasan mekanisme standar, serta ketidakkonsistenan implementasi aturan menggambarkan adanya kelemahan mendasar pada sistem pengendalian dan koordinasi. Oleh karena itu, fenomena yang tampak di permukaan harus dipandang sebagai manifestasi dari masalah tata kelola yang lebih luas, bukan semata-mata sebagai insiden administratif.

Struktur organisasi yang terdiri dari Divisi Anggaran, Verifikasi, dan Pembayaran, secara normatif dirancang untuk membentuk rantai kerja yang saling mendukung. Namun, kenyataan memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antardivisi yang berdampak langsung pada ketertiban proses anggaran dan pembayaran. Perbedaan pemahaman prosedur, variasi kualitas dokumen, serta lemahnya mekanisme komunikasi internal mengakibatkan proses menjadi tidak efisien dan rawan keterlambatan. Ketergantungan tinggi antar divisi menyebabkan hambatan pada satu bagian berimplikasi luas pada keseluruhan alur keuangan. Kondisi ini menegaskan pentingnya menelaah struktur dan koordinasi sebagai faktor kunci dalam memahami kualitas tata kelola keuangan DPRD.

Meskipun berbagai regulasi sudah menempatkan prinsip *Good Governance* sebagai pedoman utama pengelolaan keuangan daerah, implementasinya di tingkat operasional belum sepenuhnya selaras dengan norma tersebut. Tantangan seperti keterbatasan akses informasi, ketidakkonsistenan dokumen, lambatnya respons administratif, serta lemahnya pengawasan internal memperlihatkan adanya

kesenjangan nyata antara prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas dengan praktik yang berjalan. Kesenjangan ini menjadi indikator bahwa masalah pada proses anggaran, verifikasi, dan pembayaran bukan hanya bersifat teknis, tetapi ialah persoalan governance yang memerlukan kajian mendalam. Penegasan kesenjangan ini penting untuk memposisikan penelitian secara tepat dalam ruang lingkup tata kelola publik.

Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan, kondisi tersebut memperlihatkan masih adanya perbedaan antara penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dengan praktik yang berlangsung di lapangan. Aspek transparansi belum terlaksana secara optimal karena ada informasi terkait anggaran yang bersifat terbatas dan belum sepenuhnya bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan, baik dari internal organisasi maupun masyarakat. Selain itu, prinsip akuntabilitas juga menghadapi berbagai kendala, terutama akibat ketidakkonsistenan dalam kelengkapan dokumen administrasi yang berdampak pada lamanya proses verifikasi serta meningkatkan risiko terjadinya kesalahan administratif. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien di instansi pemerintah seringkali menghadapi beberapa tantangan signifikan. Gangguan pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) bisa menghambat akurasi dan aksesibilitas data, sehingga memengaruhi proses pengambilan keputusan. Selain itu, koordinasi yang buruk antar berbagai unit menyebabkan miskomunikasi, keterlambatan, dan kesalahan, yang merusak kerangka tata kelola keuangan secara keseluruhan. Lambatnya penyelesaian masalah teknis semakin memperburuk masalah ini, menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan dan pelaksanaan kegiatan keuangan. Meskipun banyak mekanisme dan prosedur yang terstruktur dengan baik untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, kekurangan dalam pelaksanaannya seringkali

mencegah tercapainya hasil yang optimal. Secara khusus, di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, pengelolaan keuangan berpusat pada tiga unit utama. Divisi Anggaran terutama bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyiapkan rencana anggaran, memastikan alokasi sumber daya yang tepat. Divisi Verifikasi memainkan peran penting dalam meneliti dokumen pengeluaran untuk menjaga kepatuhan dan mencegah kesalahan atau kecurangan. Terakhir, Divisi Pembayaran mengelola pencairan dana, memastikan pembayaran tepat waktu dan akurat. Keterkaitan antar unit-unit ini berarti bahwa hambatan di satu area bisa berdampak signifikan pada seluruh proses, sehingga menyoroti pentingnya memahami peran masing-masing unit. Pemahaman ini sangat penting untuk menilai dan meningkatkan kualitas tata kelola anggaran di wilayah tersebut.

Hasil kajian terdahulu secara umum mengindikasikan bahwa implementasi prinsip *Good Governance* pada sektor pemerintahan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga masih ada kesenjangan antara konsep ideal yang diharapkan dan pelaksanaannya dalam praktik administratif. Dewi & Diatmika (2025) Meskipun audit memastikan akuntabilitas, akses publik yang terbatas membatasi transparansi, sehingga menyulitkan warga untuk sepenuhnya mengevaluasi dan mempercayai praktik serta keputusan organisasi.

Temuan serupa muncul dalam studi Sari & Yuniarta (2023) serta Suarsana & Astawa (2022), Tata kelola yang efektif sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, komunikasi yang jelas, dan budaya organisasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas, bukan hanya sekadar menetapkan aturan dan regulasi. Kekurangan sistemik, khususnya di bidang-bidang seperti penganggaran, proses verifikasi, dan prosedur pembayaran, secara signifikan memengaruhi kinerja DPRD Buleleng. Kesenjangan ini menggarisbawahi pentingnya koordinasi dan

kolaborasi yang kuat antar berbagai instansi pemerintah untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan inisiatif, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan pelayanan publik-unit.

Penelitian Aryani dkk. (2021), Sastrini & Adtmadja (2024), serta Ramendra & Kurniawan (2023) hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa belum optimalnya implementasi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas berpengaruh secara langsung terhadap tingkat efektivitas pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan. Meskipun berbagai regulasi sudah dirancang untuk memastikan keterbukaan dan pertanggungjawaban, implementasinya sering melemah akibat lemahnya pengawasan, beban administratif yang tinggi, serta variasi interpretasi aturan antarunit. Lestari & Yudiatmaja (2024) juga memperlihatkan bahwa keberhasilan GCG mensyaratkan komitmen aktor serta sistem pengendalian internal yang terintegrasi. Kesenjangan inilah yang menjadi relevan bagi DPRD Buleleng, mengingat munculnya hambatan dalam proses pembayaran, verifikasi, dan penganggaran yang mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip *Good Governance*. Berlandaskan kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang lebih komprehensif untuk menelusuri faktor-faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian tersebut serta menganalisis dampaknya terhadap efektivitas tata kelola keuangan di lingkungan DPRD.

Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, perencanaan dan penganggaran ialah tahap yang sangat strategis karena menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, mutu perencanaan dan penganggaran akan sangat menentukan efektivitas serta keberhasilan pelaksanaan anggaran secara keseluruhan. Pada tahap perencanaan, prinsip partisipasi dan transparansi memegang peran penting untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat bisa

diakomodasi secara objektif melalui mekanisme musrenbang maupun forum konsultasi publik lainnya. Tanpa keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi, prioritas pembangunan berisiko didominasi kepentingan politik yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan riil daerah. Dalam tahap penganggaran, prinsip akuntabilitas dan orientasi pada konsensus menjadi landasan agar DPRD mampu menguji dan menyeimbangkan usulan anggaran yang diajukan eksekutif. Koordinasi yang kuat antarbagian diperlukan untuk mencegah ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan dokumen anggaran. Berlandaskan hal tersebut, penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* pada tahap awal siklus pengelolaan keuangan menjadi prasyarat utama dalam menciptakan tata kelola keuangan yang berjalan secara efektif, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Tahap pelaksanaan, verifikasi, serta pembayaran ialah titik kritis yang paling rentan terhadap hambatan operasional, karena di tahap inilah berbagai keputusan administratif dan teknis harus diproses secara tepat waktu. Prinsip efektivitas, efisiensi, dan penegakan hukum berperan penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi belanja daerah mengikuti prosedur yang berlaku. Keterlambatan verifikasi dokumen atau pencairan pembayaran, sebagaimana ditemukan dalam observasi awal di DPRD Buleleng, memperlihatkan adanya masalah koordinasi antara divisi anggaran, verifikasi, dan pembayaran. Hambatan tersebut tidak selalu disebabkan oleh ketidakpatuhan, tetapi bisa berasal dari beban kerja yang tidak proporsional, struktur birokrasi yang panjang, atau interpretasi aturan yang berbeda antarunit. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa struktur organisasi dan alur kerja internal memainkan peran besar dalam menentukan kualitas tata kelola keuangan. Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap mekanisme koordinasi dan kapasitas

SDM pada tahap ini sangat diperlukan untuk mengidentifikasi celah penerapan *Good Governance*.

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban ialah bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan, di mana prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas berfungsi sebagai indikator utama untuk menilai transparansi serta tingkat pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tata kelola keuangan. Laporan keuangan yang disusun secara jelas dan tepat waktu memungkinkan auditor, DPRD, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Ketidakkonsistenan dalam penyusunan laporan, seperti yang ditemukan pada berbagai penelitian sebelumnya, memperlihatkan bahwa tantangan implementasi *Good Governance* masih terjadi meskipun regulasi sudah cukup lengkap. Di DPRD Buleleng, kualitas pelaporan juga sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarbagian, karena kesalahan pada tahap verifikasi dan pembayaran akan berdampak langsung pada akurasi laporan akhir. Pelaporan keuangan yang tidak disusun secara akuntabel bisa mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah serta meningkatkan risiko munculnya temuan audit dari BPK maupun permasalahan hukum. Oleh karena itu, upaya memperkuat akuntabilitas pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi langkah penting untuk menjamin bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Studi ini menekankan pentingnya penguatan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam proses pengelolaan anggaran Dewan Legislatif Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng, termasuk prosedur penganggaran, verifikasi, dan pembayaran, yang saat ini terhambat oleh berbagai tantangan struktural dan administratif. Masalah seperti keterlambatan pemrosesan, dokumentasi yang tidak

konsisten, dan kurangnya transparansi dalam pengungkapan informasi secara signifikan menghambat prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Jika masalah-masalah ini tidak ditangani, efektivitas pengawasan legislatif dan kemajuan inisiatif pembangunan daerah bisa sangat terganggu, yang berpotensi menyebabkan kemunduran dalam pertumbuhan dan tata kelola daerah. Untuk mengurangi risiko ini, divisi-divisi DPRD perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi untuk memastikan bahwa semua prosedur dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar yang sudah ditetapkan. Tujuan utama studi ini ialah untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi praktik pengelolaan keuangan dan untuk mengevaluasi seberapa baik prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik diterapkan dalam praktik. Dengan menjembatani kesenjangan yang ada antara kerangka peraturan dan praktik aktual, studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga yang bisa membimbing para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas dan integritas tata kelola keuangan daerah. Pada akhirnya, temuan ini diharapkan bisa berkontribusi pada proses tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien di Kabupaten Buleleng.

Studi ini dirancang untuk memberikan wawasan berharga dan rekomendasi praktis kepada DPRD Kabupaten Buleleng guna meningkatkan praktik tata kelola di wilayah tersebut. Studi ini menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antar berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang lebih kohesif dan efisien. Selain itu, studi ini menyoroti kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan profesionalisme di antara anggota dewan dan staf administrasi. Pemanfaatan teknologi informasi yang efektif juga menjadi fokus

utama, bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional pemerintahan. Aspek penting lainnya dari studi ini melibatkan penyederhanaan prosedur administrasi, khususnya yang berkaitan dengan proses verifikasi dan pencairan anggaran, untuk mengurangi keterlambatan dan meningkatkan efisiensi. Dari perspektif akademis, studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi bisa diintegrasikan ke dalam manajemen keuangan daerah. Keberhasilan implementasi prinsip-prinsip ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja organisasi, mendorong penyampaian layanan yang lebih baik, dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dan keyakinan publik terhadap kepemimpinan dan manajemen pemerintah daerah.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Walaupun prinsip-prinsip *Good Governance* sudah ditetapkan sebagai landasan dalam pengelolaan keuangan daerah, penerapannya pada proses penganggaran, verifikasi, dan pembayaran di DPRD Kabupaten Buleleng masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh adanya kesenjangan antara ketentuan yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan, yang tercermin dari keterlambatan dalam proses verifikasi, pelaksanaan prosedur yang belum berjalan secara konsisten, serta belum optimalnya keterbukaan informasi kepada publik.
2. Nilai-nilai *Good Governance* sering dipahami oleh pelaksana teknis sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai komitmen etis dan budaya kerja. Akibatnya, pelaksanaan tata kelola lebih berorientasi pada

pemenuhan dokumen daripada penguatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas secara substansial.

3. Struktur organisasi dan pola koordinasi antarbagian, khususnya divisi anggaran, verifikasi, dan pembayaran belum berjalan optimal sehingga menimbulkan hambatan koordinatif yang berdampak pada kelancaran proses pembayaran dan realisasi anggaran. Perbedaan interpretasi aturan serta beban kerja yang tidak proporsional turut memperburuk efektivitas proses.
4. Dinamika kepentingan dan pengaruh aktor dalam lingkungan politik DPRD menyebabkan ketidakseimbangan antara fungsi politik dan fungsi administratif. Kondisi ini berpotensi melemahkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, karena beberapa keputusan prosedural bisa dipengaruhi oleh pertimbangan non-administratif.

1.3 Pembatasan Masalah

Ruang lingkup studi ini dibatasi pada analisis proses internal pengelolaan anggaran, verifikasi, dan pembayaran belanja yang dilaksanakan di DPRD Kabupaten Buleleng. Fokus kajian ialah bagaimana prinsip-prinsip GG diterapkan oleh pelaku birokrasi dan legislatif dalam praktik sehari-hari, dengan pendekatan fenomenologis untuk memahami pengalaman subyektif mereka.

Penelitian tidak membahas secara mendalam fungsi legislasi maupun pengawasan DPRD terhadap eksekutif, serta tidak menyentuh aspek hukum pidana atau audit investigatif

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata kelola proses anggaran, verifikasi, dan pembayaran dijalankan di DPRD Buleleng?

2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam proses anggaran, verifikasi, dan pembayaran di DPRD Buleleng?
3. Bagaimana pelaku teknis dan administratif memahami prinsip *Good Governance* dalam konteks pelaksanaan tugas mereka?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan tata kelola proses anggaran, verifikasi, dan pembayaran yang berlangsung di DPRD Buleleng.
2. Menganalisis penerapan prinsip *Good Governance* dalam proses tersebut.
3. Mengungkap pemahaman dan praktik pelaku terkait implementasi *Good Governance* dalam tugas mereka.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Hasil studi ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi yang bermanfaat dalam memperkaya pengetahuan serta meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Bagi Undiksha

Studi ini bertujuan untuk mengembangkan materi referensi komprehensif bagi para pemangku kepentingan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha. Selain itu, studi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademis yang berharga bagi Program Akuntansi Sarjana dengan berfungsi sebagai sumber belajar yang andal. Studi ini juga bercita-cita untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi penelitian masa depan di bidang akuntansi dan tata kelola keuangan, mendorong pertumbuhan akademis yang berkelanjutan dan penerapan praktis dalam

disiplin ilmu tersebut.

